



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 15 Mei 2017

Halaman: 22

Yogyakarta Programkan Tertib Administrasi Pertanahan

Jika ingin melakukan perubahan luasan pada sertifikat, warga bisa mengajukan perubahan data untuk pajak bumi dan bangunan.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta mengintensifkan sosialisasi tertib administrasi pertanahan, baik untuk tanah warga maupun tanah milik pemerintah agar luasan yang tercatat di dalam sertifikat sesuai kondisi yang sebenarnya di lapangan.

"Terkadang, akibat pembangunan jalan atau fasilitas umum lainnya terjadi perubahan luasan tanah milik warga. Tetapi warga tidak melakukan perubahan di sertifikatnya," kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana di Yogyakarta, Sabtu (13/5).

Akibat tidak melakukan perubahan luasan tanah di sertifikat, lanjut Hari, warga tersebut tetap membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) seperti luasan yang sebelumnya.

"Jika warga melakukan perubahan luasan di sertifikat, maka warga terse-

but bisa mengajukan perubahan data untuk pajak bumi dan bangunan. Tentunya, pajak yang dibayarkan bisa berubah sesuai kondisi yang sebenarnya," katanya.

Salah satu contoh yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah aset tanah di Brontokusuman. "Kami lakukan pendekatan ke pemilik tanah untuk perubahan sertifikatnya akibat pembangunan jalan," katanya.

Hari menengarai, kondisi serupa juga banyak dialami oleh warga di wilayah lain sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif. "Dengan tertib administrasi pertanahan, ada banyak keuntungan yang dapat dirasakan warga. Selain membayar PBB sesuai kondisi yang sebenarnya. Aset mereka pun menjadi terlindungi," katanya.

Pemerintah, lanjut dia, juga memperoleh gambaran yang lebih valid mengenai kondisi fasilitas publik dan aset yang dimiliki.

Kegiatan tertib administrasi pertanahan lain yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun ini adalah dengan mendaftarkan tanah yang berstatus Sultan Ground (SG) dan Paku Alamman Ground (PAG) menggunakan dana keistimewaan.

Pada tahun ini, ada 50 bidang tanah SG dan PAG yang akan didaftarkan agar

memiliki sertifikat. Tanah tersebut biasanya digunakan untuk fasilitas umum seperti sekolah, ruang terbuka hijau, masjid, makam atau gedung pertemuan.

Warga Penunping Protes Akses Jalan Ditutup

Sementara itu, puluhan warga Penunping, Kota Yogyakarta, akhir pekan lalu memprotes pemagaran lahan yang dilakukan sepihak oleh pemilik tanah sehingga menutup akses jalan yang selama ini digunakan warga.

"Pemagaran lahan ini otomatis menutup akses jalan warga. Sudah ada komunikasi, tetapi tidak ada titik temu. Kami berharap, ada akses jalan untuk warga," kata salah satu warga Penunping Khairul Ibad di sela aksi di Yogyakarta, Jumat (12/5).

Menurut dia, akibat pemagaran yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan seluas 3.000 meter persegi tersebut, ada 11 rumah yang kesulitan akses. Lima rumah di antaranya langsung kehilangan akses karena rumah menghadap lahan.

Khairul mengatakan warga sudah meminta kepada pemilik lahan agar tidak membangun pagar sampai ada titik temu dengan warga. "Namun, usulan itu tidak dipenuhi dan pagar tetap dibangun," katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan infor-

masi, lahan yang berada tepat di tepi Jalan Bumijo tersebut dimiliki oleh warga luar daerah dan perwakilan pemilik lahan kemudian membangun pagar mengelilingi lahan. Pagar dibangun menggunakan besi dan di beberapa bagian menggunakan bata.

Pada Jumat (12/5), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta juga melakukan penyegekan terhadap pembangunan di lahan tersebut karena menilai aktivitas pembangunan tidak memiliki izin.

"Setelah disegel, tidak boleh ada aktivitas pembangunan lagi. Jika dilanggar, maka kami bisa ajukan ke yustisi," katanya merujuk Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Sedangkan Kapolsek Jetis Kompol Hariyanto yang menemui warga saat menggelar aksi berharap agar aksi dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu akses lalu lintas. Ia pun menyarankan warga agar mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Sedangkan Anggota DPRD DIY Chang Wendriyanto yang datang ke lokasi berharap pemilik lahan memikirkan warga yang ada di sekitar lokasi dengan memberikan akses jalan. "Pemilik lahan seharusnya bisa lebih manusiawi. Tidak seperti ini," katanya.

■ antara ed: fersan rahadi

Yogyakarta,
Plt. Kepala
Sekretaris

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005